



**KEPALA DESA KEDUNGPANJI
KEPUTUSAN KEPALA DESA DESA KEDUNGPANJI
KECAMATAN LEMBEYAN
NOMOR: 30 /Kep/403.403.06/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
DESA KEDUNGPANJI**

DESA KEDUNGPANJI

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan Kedungpanji
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18

Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

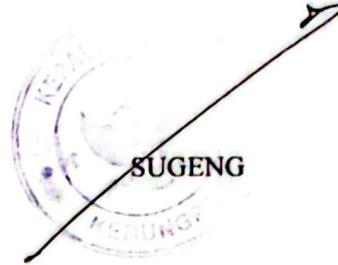
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KEDUNGPANJI
- KESATU :** Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA :** Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Kedungpanji dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa Kedungpanji;
 2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Kedungpanji; dan
 3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala desa, dan kebutuhan hukum masyarakat desa.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa Kedungpanji
- KEEMPAT :** Pos Bantuan Hukum bertempat di RT 07 RW 06 Kantor Desa Kedungpanji
- KELIMA :** Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten magetan.
- KETUJUH :** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kedungpanji
Pada Tanggal : 15 September 2025

Kepala Desa Kedungpanji



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI
NOMOR : /Kept/403.403.06/2025
Tanggal : 15 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA KEDUNGPANJI

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	SUGENG	+62 813-5954-2568	Kepala Desa
2	ENDANG LESTARI	+62 812-5962-2918	Sekretaris Desa
3	SUPENO	+62 852-1741-1083	Kasun pandeyan
4	SUGENG WINOTO	+62 857-3560-8908	Kasun Pulorejo
5	SUWITO	+62 895-7105-94433	Kasun Panji
6	MAKRUF	+62 856-4573-7349	Kasun Brangkal
7	NURUL KHOTIMAH	+62 856-7199-326	Kasun Jompong
8	ALI ROHMAT	+62 813-3544-7328	Kasun Dinginan
9	WIJANTO	+62 857-3511-9646	Ketua BPD
10	KUSNUDIN	+62 813-3590-9155	Ketua LPM

Kepala Desa

